

DAFAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Campbell Black Henry, 2009, *Black's law Dictionary, 9th edition*, West Publishing Co., St. Paul-Minnessota.
- Chazawi Adhami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Ganarsih Yenti, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia: Jakarta.
- Hamzah Andi, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej O.S. Eddy, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- Husein Yunus, 2005, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.
- Husein Yunus, 2007, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.
- Irman Tubagus, 2017, money laundering, hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam penetapan tersangka,
- Ismawan Indra, 2001, *Derivatif Modus Favorit Pencuciang Uang, Bisnis Indonesia*, Edisi 22 Juni 2001.
- Irsan Koesparmono, Armansyah, 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi.

- Krisnawati Dani, Dkk, 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Kusnardi Moh. Dan Ibrahim Harmaily, 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti: Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2004. *Komplikasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010. *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Jakarta.
- Ramelan Lihat, 2008, *Annotated Money Laundering: Case Reports*, Pustaka Juanda Tigalima 7 ELSDA Institute, Jakarta.
- Siahaan NHT, 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jala Permata, Jakarta.
- Sjahdeini Remy Sutan, 2004., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Graffiti, Jakarta.
- Soebekti, R Tjitrosoedibio, 1986. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sofyan Andy, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Sutedi Adrian, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yustiaivanda Ivan, 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Jurnal dan Skripsi

Andario Randy, *Peranan PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Vol. IV tahun 2016.

Bakri Sulaiman, *Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Modul Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal*, Jakarta: 2012.

PPATK, 2014, *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*, PPATK, Jakarta.

PPATK, *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme*, 2017.

E Louise Amastassia, Zolecha Amira Citra, *Kekuatan Pembuktian Dari Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Perkara Pidana* 2010.

Husein Yunus, *Tugas, Wewenang dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada *Seminar Pencucian Uang yang diadakan bersama oleh Business Reform and Reconstruction Corporation (BRRC), PPA K, Law Office of Remy and Darus (R&D) dan Jurnal Hukum Bisnis, di Bank Indonesia*, Jakarta, 2003.

Muslim Fithriadi & Nasution Edi, *Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah ini disampaikan pada *Seminar Nasional dan Dialog Interaktif dengan tema "Apa dan Mengapa Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Merajalela"* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pro Justitia Institute Jakarta dan Harian Umum Singgalang di Hotel Pangeran Beach, Padang pada tanggal 19 November 2011.

Rahayuningsih Toetik, 2013, *Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 28.

Ratnasari Dian Wahyuni Indah, *Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Advokat Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017.

Reksodiputro Mardjono, *Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, oleh Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional pada tanggal 2 Maret 2006.

Riski Diba Nadia Cut, *Korelasi Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dengan Lembaga Pengawas Dan Pengatur (Lpp) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, FH Uns Surakarta, 2015.

Sjahdeini Remy, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3 Tahun 2003.

Satrio Sakti Nugroho. 2014. *Jurnal Hukum: Implementasi Customer Due Dilligence dan Enhanced Due Dilligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Semarang.

Wijayanti Alcadini, Sularto RB, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkembangan Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Tigris Syarifah, Kalo Syafruddin, Mulyadi Mahmud, *Tinjauan Yuridis Hukum Acara Pidana Dalam Uu No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 *tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.*

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/Kep.PPATK/2003, Pedoman II: *identifikasi Transaksi Keuangan mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.*

Keputusan Kepala PPATK No 3/1/Kep.PPATK/2004, Pedoman IV: *pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan.*

Internet

<http://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/penanganan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-2/>, diakses pada 11 April 2018.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35146/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 9 Juli 2018.

<http://kbbi.web.id/lapor>, diakses 10 Juli 2018.

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses pada 10 agustus 2018.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_keuangan diakses pada 15 agustus 2018.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/28/17480871/uu.perampasan.aset.koruptor.diusulkan.masuk.paket.reformasi.hukum>, diakses pada 15 agustus 2018.

Muhammad Yusuf, Rancangan KUHP Persempit Ruang Gerak PPATK, tersedia di <http://requisitoire-magazine.com/2015/07/07/muhammad-yusuf->

[rancangan-kuhp-mempersempit-ruang-gerak-ppatk/](#). Diakses pada 22 agustus2018.

